

# UPAYA BPJS-KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Rosidah Patimah<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya BPJS-Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Promotif dan Preventif, mengetahui pelaksanaan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor cabang BPJS-Kesehatan Kota Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Narasumber terdiri dari Kepala Kantor Cabang BPJS-Kesehatan Kota Balikpapan, pelaksana program JKN, pengguna kartu BPJS-Kesehatan, serta masyarakat. Temuan dari penelitian ini adalah dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat oleh BPJS-Kesehatan, dapat dikatakan masih belum optimal, hal tersebut dilihat dari pelayanan promotif dan preventif yang masih terdapat kekurangan dalam setiap indikator pelayanannya, meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan, yang dilaksanakan, ditanggung, dan dijamin oleh BPJS-Kesehatan melalui kemitraan baik bersama pemerintah, lembaga kesehatan maupun swasta, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, terdapat permasalahan terhadap pelaksanaan pelayanan oleh BPJS-Kesehatan, mulai dari sumberdaya manusia yang masih perlu pembenahan, pendanaan dan kemitraan juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten Penajam Paser Utara.*

**Kata Kunci:** *BPJS-Kesehatan, promotif, preventif, penyuluhan, imunisasi, keluarga berencana, skrining kesehatan.*

## **Pendahuluan**

Untuk menekan jumlah masyarakat yang sakit dan ketergantungan obat, sangat diperlukan adanya peningkatan pada pelayanan promotif dan pelayanan preventif sebagai sarana promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rosidahpatimah9@gmail.com](mailto:rosidahpatimah9@gmail.com)

kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh BPJS-Kesehatan yang bersifat pelayanan promotif dan preventif masih dirasa kurang optimal, promosi kesehatan yang dilakukan hanya sebatas ajakan untuk berlaku hidup sehat seperti ajakan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, selogan dan baleho agar tidak merokok dan bahaya merokok, serta juga ajakan untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit menular. Sedangkan untuk upaya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang gaya hidup sehat kepada masyarakat, penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan serta penerapan gaya hidup sehat dan bersih di masyarakat masih sangat kurang. Selama ini, yang dilakukan untuk mencegah resiko penyakit menular dengan pemberian obat bukan dengan cara memberikan pengetahuan dasar untuk menghindari penularan penyakit, bahayanya, dan bagaimana cara serta upaya agar terhindar dari penyakit.

Selain itu pelayanan kesehatan promotif dan preventif juga meliputi pemberian imunisasi, baik yang diberikan pada balita maupun lansia. Pemberian imunisasi, dalam tahun 2016 sekitar 17.395 balita di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan sukses sesuai target, untuk bidang pelayanan pemberian imunisasi polio, tapi secara keseluruhan untuk pemberian imunisasi dasar dirasa masih kurang, Kabupaten Penajam Paser Utara menepati urutan kelima dalam pemberian imunisasi dasar menurut dinas Provinsi Kalimantan Timur. Pemberian imunisasi dasar yang termasuk dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif bukan hanya imunisasi polio tetapi, yang termasuk imunisasi dasar antara lain imunisasi BCG (*Bacille Calmette Guerin*), imunisasi DPT-HB yaitu *Difteri*, *Pertussis*, dan *Tetanus*, serta imunisasi Hepatitis B, pemberian imunisasi campak dan polio yang diberikan bukan hanya pada balita saja tetapi juga pada lansia dan pemberian imunisasi harus sesuai ketentuan disetiap indikatornya yaitu 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis 1 dosis campak. Pemberian imunisasi dasar harus selalu ditingkatkan, pada setiap indikatornya.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelayanan promotif dan preventif yaitu, terdapat pada kurang maksimalnya pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB). Di Kabupate Penajam Paser Utara pada saat ini dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan yang terfokus pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program KB kepada generasi muda masih jarang dilakukan. Serta permasalahan lain seperti skrining kesehatan yang dirasa masih sangat jauh dari target.

Dari beberapa uraian diatas, inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian mengenai Upaya BPJS-Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Promotif dan Preventif di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Upaya***

Menurut Poerwadarminta (2010:574), upaya adalah usaha untuk mencapainya maksud, akal, ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal yang dilaksanakan.

Dilihat dari pengertian tentang upaya, maka upaya juga bisa disamakan dengan peran yaitu menurut Soerjono (2010:212), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan suatu peran.

### ***Kualitas***

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2008:10) menjelaskan bahwa kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumberdaya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi melebihi harapan. Sedangkan menurut Triguno (2006:76), mengatakan bahwa kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumberdaya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja, atau produk yang berupa barang dan jasa.

Crosby, Deming dan Juran (dalam Purnama 2006:10) kualitas menurut Crosby adalah kesesuaian dengan persyaratan, sedangkan Deming adalah “*derajat*” keseragaman produk yang bisa diprediksikan dan tergantung pada biaya rendah dan pasar, serta menurut Juran kualitas adalah kesesuaian dengan penggunaan (memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan).

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa yang dimaksud dengan kualitas adalah suatu tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan manfaat.

### ***Masyarakat***

Znaniiecki (dalam Elly 2013:7) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Sedangkan Soerjono (2010:22) masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Dimana tidak ada ukuran mutlak atau angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, disuatu wilayah tertentu dengan waktu yang cukup lama.

### ***Pelayanan***

Menurut Sampara (dalam Sinambela 2011:5), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Groonros (dalam Ratminto dan Atik 2012:2), mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menolong orang lain dengan inetraksi secara langsung untuk menyediakan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen maupun penerima jasa.

### ***Kesehatan***

Dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kemudian menurut Wahid (2007:6), kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan serta bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari bukan tujuan hidup, kesehatan adalah konsep positif yang menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.

AR Trisno Sudiro (dalam Ricki M Mulia 2005:2), menyatakan kesehatan adalah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

### ***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial***

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

### ***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan***

Peserta BPJS (dalam UU SJSN 2004) adalah peserta PBI jaminan kesehatan terdiri atas orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

masyarakat yang layak di berikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun kegiatan pengusahaan peningkatan kualitas kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meliputi:
  - a. Penyuluhan kesehatan perorangan
  - b. Imunisasi dasar.
  - c. Keluarga Berencana
  - d. Skrining kesehatan
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan) di Kabupaten Penajam Paser Utara

### **Hasil Penelitian**

#### ***Upaya BPJS-Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat***

1. Penyuluhan Kesehatan Perorangan  
Penyuluhan kesehatan perorangan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas adalah suatu upaya penambahan pengetahuan dan kemampuan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar individu, keluarga, kelompok dan masyarakat merubah perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan kantor cabang Balikpapan melalui perpanjangan tangan BPJS-Kesehatan kantor layanan operasional kabupaten (KLOK) di Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penyuluhan kesehatan perorangan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merubah pola hidup dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, memberikan berbagai informasi mengenai resiko penyakit, penanganan penyakit menular dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. BPJS-Kesehatan dalam melakukan penyuluhan kesehatan perorangan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, baik dari lembaga kesehatan sebagai pihak yang lebih memahami kesehatan maupun lembaga pemerintahan. Kerjasama tersebut sebagai upaya pemaksimalan dalam penyampaian materi kepada masyarakat agar informasi yang diberikan lebih akurat, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum, diharapkan juga dengan adanya dampingan dan dukungan dari pemerintah dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi pemerataan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu juga, diharapkan dengan adanya penyuluhan kesehatan tersebut masyarakat akan dapat merubah pola hidup yang sekarang ke pola hidup yang lebih baik dengan

memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri, keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan di Desa Labangka, mengenai penyuluhan kesehatan perorangan didapatkan informasi bahwa ada *miss* komunikasi yang terjadi dalam penyampaian informasi tentang pelaksanaan penyuluhan kesehatan oleh BPJS-Kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak dapat mencangkup seluruh masyarakat yang ada di daerah sasaran penyuluhan. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang diberikan oleh BPJS-Kesehatan bersama petugas puskesmas Babulu tidak sampai pada sebagian masyarakat, dan sebagian masyarakat merasa bahwa informasi tentang penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan masih kurang bahkan terjadi ketidaktahuan di sebagian masyarakat akan pentingnya penyuluhan kesehatan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan penyakit menular, pencegahan penyakit serta pengelolaan faktor resiko penyakit, sebagai indikator dalam penyuluhan kesehatan perorangan yang tercantum dalam manfaat program JKN yang dilaksanakan BPJS-Kesehatan.

Penyuluhan kesehatan perorangan bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku individu, kelompok maupun masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, dengan sasaran jangkauan penyuluhan mencangkup individu, kelompok serta masyarakat. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan dapat dilakukan di dalam substitusi pelayanan seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, klinik. Dapat juga dilakukan secara langsung kepada individu, kelompok, dan masyarakat serta juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui poster, gambar-gambar, leaflet, dan sebagainya.

BPJS-Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan telah dilakukan oleh BPJS-Kesehatan bersama petugas puskesmas wilayah kecamatan Babulu di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Tetapi, informasi tentang adanya penyuluhan kesehatan yang dilakukan BPJS-Kesehatan bersama lembaga kesehatan terkait dan pemerintah dapat dikatakan belum mencapai hasil yang memuaskan dan masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan adanya *miss* komunikasi yang terjadi dilingkungan masyarakat dan pemerintah desa Labangka sehingga informasi yang didapat masyarakat masih sedikit bahkan sebagian masyarakat masih tidak mengetahui tentang penyuluhan kesehatan yang dilakukan, mengakibatkan tidak tercapainya sasaran tujuan yang diinginkan dalam penyuluhan kesehatan tersebut. Selain itu juga, kurangnya minat baca masyarakat mengakibatkan tidak efektifnya pemasangan baleho, spanduk, brosur, dan lainnya yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan sebagai salah satu alternatif lain untuk penyampaian informasi. Ditambah juga dengan tidak terawatnya spanduk, brosur dan lainnya, serta kurang kreatif dalam pembuatan spanduk, brosur dan lainnya mengakibatkan kurang menariknya

minat masyarakat untuk membaca informasi yang ingin disampaikan. Hal-hal diatas mengakibatkan masyarakat kurang mengerti tentang penyuluhan kesehatan yang memuat hal-hal seputaran kesehatan seperti pola hidup sehat dan bersih, pencegahan penyakit, penyakit menular dan resiko penyakit yang berdampak pada masyarakat yang lebih memilih berobat dari pada melakukan pola hidup sehat dan bersih ataupun pencegahan terhadap penyakit. Sehingga tujuan dari pelayanan promotif dan preventif tidak terlaksanan dengan maksimal.

## 2. Imunisasi Dasar

Pelaksanaan imunisasi dasar dapat dikatakan berhasil, dan memenuhi target dalam mencapai tujuan dari pelayanan promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat mulai dari usia bayi sampai dengan orang tua lanjut usia untuk mencapai pemerataan kesehatan di masyarakat. Selain pemberian imunisasi yang berhasil, pemberian imunisasi juga harus dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pemberiannya yang telah diatur oleh kementrian kesehatan. pemberian informasi mengenai imunisasi dasar juga sangat penting untuk mensukseskan program imunisasi dasar. Pemberian informasi melalui sosialisasi tentang imunisasi dasar, pentingnya melakukan imunisasi dasar pada bayi dan lansia, serta dapak dari imunisasi juga sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mengalami ketakutan maupun keraguan dalam melakukan imunisasi yang telah diatur oleh pemerintah melalui kementrian kesehatan dengan pemberian jaminan dan penyediaan fasilitas alat medis oleh BPJS-Kesehatan, yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas atau fasilitas tingkat 1.

Pengaturan jadwal pemberian imunisasi dasar sangat dibutuhkan untuk mengatur jarak waktu yang dibutuhkan untuk dosis pemberian pertama, juga untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyakit lainnya yang dapat timbul akibat dari imunisasi. Adanya jadwal pemberian juga sangat berguna untuk memberikan penyesuaian atau adaptasi tubuh bayi, anak atau lansia terhadap vaksin yang telah diberikan dalam imunisasi tersebut. Selain itu, juga berguna agar imunisasi dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga ada keteraturan dalam pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi dasar disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat 1 atau puskesmas yang telah berkerjasama dengan BPJS-Kesehatan untuk menjalankan program imunisasi dasar, dalam hal ini BPJS-Kesehatan menjadi penjamin dan penyedia obat-obatan serta alat-alat medis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan imunisasi dasar tersebut. Imunisasi pada bayi sangatlah penting selain untuk meingkatkan kekebalan tubuh anak, imunisasi juga akan merangsang tubuh anak untuk menghasilkan kekebalan alami dan jika dilakukan dengan baik dan benar, maka perlindungan dan kekebalan hamper 100% akan didapat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan jadwal yang

pas dan cocok untuk diterapkannya imunisasi agar dapat teratur, baik dan benar.

Pemberian imunisasi bukan hanya pada saat bayi saja tetapi pemberian imunisasi dasar masih berlanjut pada anak dibawah usia dua tahun. Pemberian imunisasi lanjutan ini pada anak usia dibawah dua tahun bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh lebih lanjut pada anak, serta merupakan program lanjutan dari imunisasi dasar untuk bayi. Sesuai dengan indikator imunisasi dasar yang perlu diberikan pada anak dibawah usia dua tahun pemerintah melalui kementerian kesehatan telah memberikan jadwal imunisasi dasar serta jenis imunisasi yang wajib diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehat pada anak. Imunisasi lanjutan sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuannya untuk memperoleh perlindungan dan kekebalan tubuh yang diinginkan.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui imunisasi dasar dapat dikatakan berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa imunisasi dasar yang diberikan dan ditanggung oleh BPJS-Kesehatan mencapai hasil yang memuaskan, hal tersebut dirasakan oleh BPJS-Kesehatan dan juga oleh petugas puskesmas di Kecamatan Babulu yang menunjukkan hasil imunisasi dasar yang dapat dikatakan berhasil dan sukses, hal ini dapat dilihat dari wawancara terhadap pelaksana imunisasi dasar yaitu bidan dan bersama masyarakat yang mengatakan bahwa pemberian imunisasi berjalan lancar dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, data dari dinas kesehatan yang dimiliki oleh BPJS-Kesehatan menunjukkan bahwa pemberian imunisasi dalam kurun waktu tahun 2016 sekitar 17.395 balita di Kabupaten Penajam Paser Utara, data tersebut menunjukkan kesuksesan imunisasi dasar yang telah dilaksanakan. Serta pelaksanaan imunisasi dasar yang menjadi faktor utama suksesnya imunisasi dasar ini adalah dengan adanya pelaksanaan imunisasi yang sesuai dengan jadwal dan dilaksanakan dengan baik, serta dukungan dan *antusiasme* dari masyarakat untuk melakukan imunisasi baik pada masyarakat yang memiliki bayi maupun masyarakat lanjut usia. Imunisasi memiliki banyak macam, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua imunisasi yang ada ditanggung oleh BPJS-Kesehatan, imunisasi yang diberikan dan ditanggung oleh BPJS-Kesehatan berupa imunisasi dasar meliputi imunisasi polio, hepatitis B, DPT, BCG, dan imunisasi campak. Imunisasi dasar wajib diberikan pada bayi mulai dari usia 0bulan dan pada lansia dapat diberikan pada usia 65tahun keatas. Imunisasi yang diberikan bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi.

### 3. Keluarga Berencana

Pelaksanaan program keluarga berencanan untuk para laki-laki (suami) sangat kurang bahkan kebanyakan masyarakat tidak tahu adanya pelaksanaan keluarga berencanan untuk para laki-laki (suami), hal ini mengakibatkan

program keluarga berencana dengan sasaran tujuan para laki-laki dapat dikatakan jauh dari kata berhasil. Selain itu, pemberian informasi untuk pelaksanaan program keluarga berencana dirasa masih sangat kurang terutama pada pemberian informasi tentang program keluarga berencanan untuk para laki-lak (suami). sangat perlu untuk ditingkatkan dalam pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana terutama dalam penyampaian materi tentang program sosialisasi untuk para laki-laki (suami). Agar masyarakat terutama laki-laki (suami) dapat memahami penting dan manfaat program keluarga berencana yang ditujukan untuk para laki-laki (suami).

Untuk mengsucceskan pelaksanaan program keluarga berencana pemerintah membentuk suatu badan yang menjalankan dan mengawasi program tersebut yaitu Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1992. Dalam hal ini, BKKBN sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan program keluarga berencana, yang dijaminin dan diberikan oleh BPJS-Kesehatan sebagai lembaga yang menyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sedangkan pelaksanaan program keluarga berencana dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga ahli dalam kesehatan yang berada di fasilitas tingkat 1 tiap kecamatan yang merupakan pelayan kesehatan yang paling awal dan dekat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, penggunaan alat kotrasepsi banyak dilakukan oleh kaum perempuan (istri) hal tersebut dapat dikatakan berhasil untuk kaum perempuan (istri). Tetapi program keluarga berencanan bukan hanya ditujukan untuk kaum perempuan (istri) saja, tetapi juga diperuntukan untuk kaum laki-laki (suami), maka dari itu program keluarga berencana untuk kaum laki-laki (suami) harus lebih diperhatikan agar masyarakat dari kaum laki-laki (suami) dapat lebih berpartisipasi dalam mengsucceskan program keluarga berencana tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi juga harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami tentang manfaat program keluarga berencanan, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam program ini. Karena program keluarga berencana ini memiliki banyak manfaat yang didapatkan oleh pasangan suami istri selain untuk menekan jumlah kelahiran juga dapat menurunkan resiko kehamilan, menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya, selain itu juga, memberikan banyak manfaat bagi anak. Maka dari itu program keluarga berencana sangat perlu untuk selalu ditinggkatkan. Dan pemberian pengetahuan dan pemahaman harus selalu dilakukan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualiatas kesehatan masyarakat.

Program keluarga berencana yang terdapat dalam program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS-Kesehatan, dilaksanakan melalui bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti dalam pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh BKKBN, serta tenaga medis sebagai pelaksana kegiatan program

keluarga berencana. Dilihat dari begaimnana pentingnya program keluarga berencana untuk mensejahterakan keluarga maka sangat diperlukan adanya dukungan dalam mengsucceskan pelaksanaan program keluarga berencana ini. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana pada saat ini sudah dapat dikatakan berhasil, dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan program KB, tetapi kebanyakan masyarakat tersebut ddari para kaum perempuan (istri), dan masih sedikit dari para laki-laki (suami). Hal ini juga disebabkan karena banyaknya program dan alat kontrasepsi hanya diperuntukan untuk kaum perempuan (istri) saja., sedangkan untuk kaum laki-laki (suami) sangat minim, maka dari itu perlu adanya peningkatan program dan inovasi-inovasi baru untuk menunjang pelaksanaan program keluarga berencana yang diperuntukan untuk kaum laki-laki (suami). Kemudian untuk pelaksanaan sosialisasi, BPJS-Kesehatan dibantu pelayan kesehatan dan lembaga pemerintah, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Tetapi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dirasa masih kurang, masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui tetang program keluarga berencana maupun informasi tetan pemakaian alat kontrasepsi, terutama untuk kaum lai-laki (suami). Hal ini mengakibatkan informasi yang didapat masyarakat sangat kurang, yang berimbas pada ketidak tahuan dimasyarakat.

#### 4. Skrining Kesehatan

Skrining kesehatan dilakukan petugas puskesmas ditiap kecamatan, hal ini mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat karena pelaksanaan skrining kesehtan dapat lebih difokuskan pada masyarakat tiap kecamatan masing-masing. Selain itu, dalam pelaksanaan sosialisasi tentang skrining kesehatan dilakukan bersama dengan petugas kesehatan sebagai tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang lebih mengerti tentang skrining kesehatan, sehingga lebih dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan maupun pentingnya melakukan skrining kesehatan, untuk mencega dan menangani penyakit lebih parah dan berbahaya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun pemberian informasi secara langsung juga dilakukan pemberian informasi secara tidak langsung baik melalui iklan, brosur, leaflet, spanduk, baleho dan lainnya, BPJS-Kesehatan juga melakukan inovasi baru dengan memunculkan aplikasi berbasis mobile JKN-KIS BPJS-Kesehatan, yang merupakan aplikasi untuk melakukan skrining kesehatan secara online melalui aplikasi tersebut. Diharapkan dengan berbagai program skrining kesehatan dan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih memperhatikan kesehatan dan dapat lebih cepat, tanggap dalam mendeteksi suatu penyakit yang diderita sehingga dapat lebih cepat di tangani dan diobati, yang tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana tujuan dari pelayanan promotif dan preventif yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS-Kesehatan.

Skrining kesehatan yang dilakukan oleh BPJS-Kesehatan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat 1 yaitu puskesmas sebagai bentuk kerjasama dengan BPJS-Kesehatan. Selain itu BPJS-Kesehatan juga dibantu petugas kesehatan dalam melaksanakan sosialisasi terkait skrining kesehatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat sebagai pemberian informasi, kemudian BPJS-Kesehatan juga memberikan informasi secara tidak langsung melalui pemasangan iklan yang memuat informasi tentang skrining kesehatan seperti pemasangan baleho, spanduk, pembagian brosur dan lainnya. Serta mengembangkan program berbasis aplikasi yang memuat skrining kesehatan melalui aplikasi mobile JKN-KIS BPJS-Kesehatan. Tetapi pada pelaksanaannya dimasyarakat dianggap masih kurang, baik pemberian informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian juga aplikasi mobile JKN-KIS BPJS-Kesehatan dirasa masyarakat kurang efektif karena masyarakat sebagian besar tidak paham bahkan tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut terutama masyarakat kecil dan awam.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat BPJS-Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat***

#### **1. Faktor Pendukung**

##### ***a. Sumberdaya Manusia (SDM)***

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, karena peralatan yang canggih tanpa peran aktif manusia tidak akan berarti apa-apa, maka dari itu sumberdaya menjadi sangat penting untuk menunjang segala aktifitas yang dilakukan. Perlu adanya perencanaan Sumberdaya manusia guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, agar dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.

##### ***b. Faktor Struktur Organisasi***

Kualitas pelayanan salah satunya bergantung pada komponen-komponen pembentukannya. Kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi, dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan *standard operating procedure* (SOP). Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Apabila suatu organisasi memiliki pembagian kerja yang sesuai kebutuhan, memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya, serta penempatan desentralisasi yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang cepat, dan tepat tentu dapat menunjang kualitas pelayanan yang baik.

c. *Faktor Sistem Pelayanan*

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berdampak pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan yang baik dapat menekan tindak korupsi. Selain itu, penerapan teknologi dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Faktor Penghambat

a. *Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kueang Memadai*

Sumberdaya manusia menjadi sangat penting dalam setiap organisasi, karena menjadi faktor utama yang menjalankan seluruh program dan pelayanan yang ada. Sumberdaya manusia yang handal akan membantu organisasi mengantisipasi dan merencanakan isu yang muncul dari kondisi yang stabil maupun dinamis, maka perlu adanya perbaikan dalam sumberdaya manusia agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan lebih optimal, sehingga dapat pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang prima untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

b. *Pendanaan atau Biaya yang Tidak Stabil*

Pendanaan sangat dibutuhkan untuk menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar masyarakat dapat menikmati seluruh fasilitas kesehatan terbaik yang diberikan oleh BPJS-Kesehatan, pendanaan juga berpengaruh pada penyediaan alat-alat medis untuk menunjang seluruh kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS-Kesehatan, baik yang digunakan dalam pelayanan promotif dan preventif seperti imunisasi dasar, dalam pelaksanaan program keluarga berencana, dan skrining kesehatan. Selain itu, pendanaan juga berimbas pada penyediaan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat seperti pemberian imunisasi dasar, dan obat pencegahan penyakit menular, dan kontrasepsi pil untuk program keluarga berencana. Pendanaan sangat berpengaruh untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

c. *Kemitraan yang Perlu diperluas*

Kemitraan BPJS-Kesehatan yang dirasa masih kurang untuk mendukung kerja BPJS-Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Indonesia. kemitraan sangat dibutuhkan oleh BPJS-Kesehatan guna memberikan pelayanan dan penjaminan yang terbaik bagi masyarakat dan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan kerjasama bersama rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta untuk memberikan pelayanan kesehatan, selain itu kerja sama bersama perusahaan atau swasta guna memperkuat kestabilan pendanaan untuk jaminan kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan. Kerjasama dalam bidang teknologi juga sangat dibutuhkan untuk memberikan inovasi-inovasi baru untuk mempermudah pelayanan kesehatan pada

masyarakat, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Keseluruhan kendala tersebut mengakibatkan kurang optimalnya kinerja BPJS-Kesehatan dan juga pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Pelayanan promotif dan pelayanan preventif adalah tingkat pertama dalam rangkaian pelayanan yang diberikan oleh BPJS-Kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan skrining kesehatan diberikan secara selektif.
2. Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan BPJS-Kesehatan bersama lembaga kesehatan terkait dapat dikatakan belum mencapai hasil yang memuaskan, dan informasi yang didapat masyarakat masih sedikit. Selain itu, alternatif lain untuk penyampaian informasi secara tidak langsung kepada masyarakat masih kurang optimal.
3. Pelaksanaan imunisasi dasar yang diberikan dan ditanggung oleh BPJS-Kesehatan secara keseluruhan sudah mencapai hasil yang memuaskan. Imunisasi dasar baik untuk balita maupun untuk lansia sudah mencapai hasil yang optimal.
4. Pelaksanaan program keluarga berencana dapat dikatakan berhasil, untuk para perempuan (istri), dengan banyaknya masyarakat yang melakukan program KB, dan masih kurang untuk para laki-laki (suami), disebabkan pemahaman dan informasi yang kurang.
5. Pelaksanaan skrining kesehatan masih kurang efektif yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat 1 dan BPJS-Kesehatan. Pemberian informasi secara tidak langsung melalui pemasangan iklan dan aplikasi mobile JKN-KIS BPJS-Kesehatan, dirasa masih kurang optimal.
6. Faktor pendukung BPJS-Kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu BPJS-Kesehatan memiliki mitra kerja dalam mengsucceskan program BPJS-Kesehatan. Program tersebut berjalan dengan kemitraan pemerintah, pelayan kesehatan dan swasta serta teknologi untuk menunjang tercapainya pelayanan yang lebih baik.
7. Faktor penghambat BPJS-Kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu terdapat pada sumberdaya manusia, yang mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kurang optimal, pendanaan yang belum stabil sehingga berimbas pada penyediaan fasilitas kesehatan dan penjaminan pelayanan, selain itu mitra kerja BPJS-Kesehatan yang masih perlu untuk diperluas lagi.

### **Saran**

1. Perlu adanya perbaikan untuk menekan faktor penghambat di BPJS-Kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu dengan melakukan perombakan secara berkala dalam perekrutan sumberdaya manusia, agar pelaksanaan pelayanan dapat optimal. Seperti dalam pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan sosialisasi, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan pelaksana penyelenggara program pelayanan kesehatan
2. Melakukan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penataan keuangan, agar tidak berimbas penyediaan jaminan pelayanan dan fasilitas medis, serta obat seperti pada pemberian pelayanan imunisasi dasar, peningkatkan program keluarga berencana, skrining kesehatan serta pemberian informasi secara tidak langsung.
3. Perlu adanya peningkatkan dan memperluas kemitraan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Seperti peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, perusahaan swasta dan juga kerjasama dalam bidang teknologi.

### **Daftar Pustaka**

- Fandy, Tjiptono. 2008. *Strategi Bisnis Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mulia, Ricki M. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Poerwadarminta W.J.S. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Purnama, Nursya'bani. 2006. *Manajemen Kualitas, Perspektif Global*. Bandung : Alfabeta
- Ratmonto, Atik Winarsi.2012. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana
- Sinabela. Lijan Poltak. Dkk, 2011. *Revormasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Triguno. 2006. *Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja, Edisi Keenam*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press

### **Dokumen-dokumen :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.